

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika. Cetakan pertama. Jakarta.
- A. Hamid S. Attamimi. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT. Kanisius. Yogyakarta.
- Alfin Sulaiman. 2011. *Keuangan Negara pada Badan usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu Hukum*. PT. Alumni. Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Anwar Sanusi. 2017. *3 Pilar Utama Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (Market Orientation, Good Corporate Governance and Professional Leadership)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Triguna. Jakarta Selatan.
- Arifin P. Soeria Atmadja. 2010. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co. St. Paul Minn.
- Chidir Ali. 2014. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan dari Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York, Russel, 1971), (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, Cetakan I, September 2006
- Idham. 2004. *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*.

- P.T. Alumni. Bandung.
-2010. *Paradigma Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. P.T. Alumni. Bandung.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. (Sekjen dan Kepaniteraan MKRI). Jakarta Konstitusi Press. Jakarta.
- Kusnu Goesniadhie. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Nasa Media. Malang.
- Muhammad DjafarSaidi dan Eka Merdekawati. 2022. *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers. 2022. Cetakan ke-7.
- Moye, John E., *The Law Business Organization*, 6 Edition, Thomson, New York, 2005,
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke 13. Kencana. Jakarta.
- Rahayu hartini. 2017. *BUMN Persero (Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia)*. Setara Press. Malang.
- Riawan Tjandra. 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo. Jakarta.
- Ridwan Khairandy. 2008. *Hukum Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Total Media. Yogyakarta.
-, 2012. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.

JURNAL

A.A. Gede D.H. Santosa. "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat". Jurnal Komunikasi Hukum. Edisi No. 2 Vol. 5 November 2019.

Agung Dinarjito. "Penyertaan Modal Negara Pertumbuhan Aset dan Konerja Badan Usaha Milik Negara". E-Jurnal Akuntansi. Politeknik Keuangan Negara STAN. Vol. 28. Nomor 2 Agustus 2019.

David Putra Timbo. "Status Uang APBN Yang Dipisahkan dan Dijadikan Penyertaan Modal Pada BUMN Persero", LAW REFORM. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol. 8, no. 2, pp. 33-47, Januari 2013.

Dyah Hapsari Prananingrum. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum". Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Edisi No. 1 Vol. 8 April 2014.

Ridwan Khairandy. *"Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara"*. Jurnal Hukum. Edisi No. 1 Vol. 16 Januari 2009.

Wasis Susetio. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria". Lex Jurnalica. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Volume 10, Nomor 3, Desember 2013.

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaindonesia.org, diunduh pada 5 Januari 2023.

Kekayaan yang dikuasai Negara vs. Kekayaan yang dimiliki Negara', diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/13760/Kekayaan-yang-Dikuasai-Negara-vs-Kekayaan-yang>

[DimilikiNegara.html#:~:text=Kekayaan%20negara%20diartikan%20sebagai%20benda,negara%20\(RUU%20Kekayaan%20Negara\)](#). Tanggal 13

Juli 2023 Pukul 14.00 WITA.

DESERTASI

Suhartono. 2011. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*. Desertasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

TESIS

Dolly Setiawan, 2017. *“Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Persero Korelasinya Dengan Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi”*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

MAKALAH ATAU ESSAI ILMIAH

Erman Rajagukguk. 2006. *“Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara”*. Disampaikan pada Diskusi Publik Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Komisi Hukum Nasional (KHN) RI. Jakarta 26 Juli 2006.

Made Nurmawati. 2017. *Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangani*. Fakultas Hukum Udayana. Bali.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang : tentang pengelolaan kekayaan negara.